

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulisan Skripsi ini berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian dan analisis data oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Landasan yuridis peningkatan tipologi Polda NTB dari “B” menjadi “A” adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Tipologi. Peningkatan tipologi Polda NTB telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 yaitu bahwa terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan, adanya dokumen usulan peningkatan status kesatuan kewilayahan, pertimbangan peningkatan Tipologi Polda NTB dari tipe B menjadi tipe A sesuai perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi saat ini serta pertimbangan khusus yang dimiliki oleh Polda NTB, beban tugas yang dihadapi lebih besar dibandingkan dengan Polda-Polda lain yang memiliki eselonisasi lebih tinggi (Tipe A), sedangkan eselonisasi Polda NTB masih dibawah Polda-Polda dimaksud.
2. Implikasi hukum terhadap perubahan Tipologi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu berdampak pada Sumber daya Manusia (SDM) semakin bertambah baik personil Polri dan ASN Polda, bertambahnya jumlah sarana dan prasarana Polda, bertambahnya operasional Polda dan kegiatan Polda, bertambahnya anggaran operasional Polda NTB, dan sistem pelayanan publik

semakin optimal, sehingga perubahan Tipologi Polda NTB dari B menjadi A dapat memberikan pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat, mengefektifkan pengendalian tugas dan fungsi kepolisian di wilayah hukum Polda NTB.

B. Saran

Adapun saran peneliti berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat wajib mempertahankan dan memajukan peningkatan Tipologi Polda NTB dari Tipe B menjadi Tipe A saat ini, dengan harapan operasional Polda NTB dapat lebih optimal dan efektif sesuai dengan tantangan yang semakin kompleks dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan teknologi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya Polda NTB diharapkan memberikan inovasi terhadap program kerja dan sosialisasi terhadap keadaan sosial masyarakat NTB.
2. Diharapkan pemerintah agar bersinergi dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum NTB. Dalam rangka mendukung peningkatan Tipologi Polda Nusa Tenggara Barat diperlukan anggaran pembangunan fasilitas dan peralatan materil yang memadai serta penambahan personel sesuai dengan pelayanan Polri kedepan. Selanjutnya untuk kedepan tetap melakukan pembinaan

terhadap SDM Polda dalam menjaga kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih baik kedepan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Albert Silalahi, 2005, *Studi tentang Ilmu Administrasi (Konsep Teori dan Dimensi)*, Jakarta, Sinar Baru Algensindo.
- Budi Rizki Husin, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Budi Winarno, 2002, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Presindo.
- Fadillah Putra, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Irfan Islami, 2003, *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 2005 Pertama Widya Karya, Bandung.
- M.Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- ST. Marbun, Moh.Mahfud MD, 2000, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Suripto. 2004, *Strategi Kebijakan Daerah*. Candra Press. Pati. Jawa Tengah.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

- _____, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 2005, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia*, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia*, Tap. MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).
- Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168);
- Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Naskah Akademik Peningkatan Status Polda Nusa Tenggara Barat dari Tipe B menjadi Tipe A tahun 2017.

Telaahan staf nomor : R/TS / 01 /VIII/2017 tentang peningkatan tipologi polda NTB dari “B” menjadi “A”

Hasil Wawancara, Ibu Henny Sri Rohmi sebagai Kabag RBP Polda NTB, Hari Kamis, Tanggal 26 Desember 2019.

A. Jurnal

Novianto M. Hantoro, “Klasifikasi *Jabatan Dalam Kelembagaan Negara:Permasalahan Kategori Pejabat Negara*”, Negara Hukum: vol. 7, no. 2, november 2016 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016.

Awaloedin Djamin, “Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas”, JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I, No. 3, 2015, Profesor (Emeritus) Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu kepolisian (PTIK), 2015.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan hanjar siswa: Penjagaan Pengawalan Patroli, Bab Patroli.

B. Wawancara

Henny Sri Rohmi, 2019, *Dampak Perubahan Tipologi Polda NTB*, Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2019 Pukul 11.00 Wita, Polda Nusa Tenggara Barat, Mataram.